



**Di Berlin, Walikota Bicara Urbanisasi
 Pendatang Perberat Beban Jogja**

JOGJA -- Urbanisasi menambah berat beban Jogja. Serbuan pendatang, khususnya pada siang hari, menambah beban pada beberapa fasilitas publik, antara lain transportasi, kebersihan, pendidikan, dan kesehatan.

Hal tersebut dikemukakan Walikota Yogyakarta, H Herry Zudianto saat berbicara dalam forum Berlin Summer Dialogue 2008 yang diselenggarakan di Balaikota Berlin, Jerman, pekan lalu. Dialog diikuti peserta dari pemerintah, konsultan, dan LSM dari Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.

Menurut Herry, urbanisasi di Jogja mengakibatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat berkurang, terutama disebabkan berkurangnya ruang untuk menampung pertemuan warga. Kesempatan mengaktualisasikan hasil budaya masyarakat yang membutuhkan ruang, juga menjadi terbatas.

"Urbanisasi juga mengakibatkan peningkatan pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran di wilayah kota," tutur Herry dalam rilis yang dikirim dari Berlin, kemarin.

Namun demikian, sambungnya, meskipun penduduk sangat beragam akibat urbanisasi, tidak dijumpai konflik yang berarti atau signifikan di Jogja. Keragaman budaya yang dibawa masing-masing kelompok menjadikan masyarakat Jogja lebih terbuka untuk me-

>> KE HAL 6

Pendatang Perberat Beban Jogja

Sambungan dari hal. 1

nerima budaya yang baru, walaupun tetap difilter dengan budaya yang sudah dimiliki.

"Kalaupun terjadi konflik, pada umumnya bersifat parsial. Khususnya akibat perbedaan kepentingan antara kebutuhan lahan terbuka dengan kebutuhan ekonomi," terang dia.

Dikatakan, Jogja tidak bisa menolak atau menghindari dari urbanisasi. Sehingga kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasinya berupa peningkatan kapasitas, kelembagaan, pembiayaan, dan pengelolaan kota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kerjasama di tingkat regional.

Ditambahkan, di Jogja juga terdapat urbanisasi yang hanya bersifat administratif, yaitu berupa perpindahan KTP.

Dengan memiliki KTP Jogja, "pendatang administratif" bisa merasakan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, misalnya jaminan pendidikan daerah atau beasiswa yang nilainya lebih besar ketimbang daerah lain.

"Fenomena ini muncul seiring dimulainya otonomi daerah pada tahun 2000. Pola baru ini muncul sebagai akibat adanya disparitas kebijakan antardaerah di Provinsi DIY, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar," tandasnya. (fir)

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Umum	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005